

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI.
- . 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atok, A. Rosyid Al. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press.
- Belinfante, A.D. dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah. 1983. *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Binacipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daliyo, J. B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prennahlindo.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hadjon, Philipus M. dkk. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hanitijo, Ronny. 1993. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indo.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim dan Erlies Septiana N. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Indrati, Maria Farida. 2011. *Ilmu Perundang-undangan (1)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. 1999. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*. Alih Bahasa Drs. H. Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1997. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Lubis, M. Solly. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-hill. Co.
- Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- . 2015. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Peradilan Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- . 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Muchsan, 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pattiro, Yopie Morya I. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV Keni Media.
- . 2013. *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Keni Media.

- Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Dan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Purnama, I Ketut Adi. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Adirama.
- Pide, Andi Mustari. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- . 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan dan Nurmalita A. Harahap. 2018. *Hukum Kepegawaian*. Yogyakarta: UII Press.
- Sadjjono, H. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sanit, Arbi. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sarwono, Jonathan. 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehino. 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suguno, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumardjono, Maria. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2011. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Umar, Dzulkifli dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*.  
Surabaya: Grahamedia Press.

Utrecht, E. dan Moh Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum  
Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Wiratha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan  
Tesis*. Yogyakarta: Andi.

Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zamzuri. 1985. *Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling)*. Yogyakarta. Al-  
hikmah.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara  
Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang  
Kementerian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur  
Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur



Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi.

### C. JURNAL

- Marwi, Akhmad. 2016. *Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)*. Kajian Hukum Dan Keadilan Ius. Jurnal Ius Vol. IV No. 3.
- Marzuki, H.M. Laica. 2017. *Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI*. Makalah Disampaikan Dalam Seminar HUT Peratun. Jakarta.
- Manengkey, Mario Ferdinandus. 2015. *Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara*. Lex Administratum Vol. III No. 6.
- Sendhikasari D., Dewi. 2018. *Wacana Pejabat Gubernur Dari Polri*. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. X No.03/I/Puslit.
- Sunarto. 2006. *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Dalam Pantauan Komunitas Pers Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Seminar Nasional Optimalisasi Profesionalisme Anggota POLRI dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kepolisian yang

diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Rabu 7 Desember 2006 bertempat di Ruang Rama Shinta Hotel Patra Jl. Sisingamangaraja. Semarang.

Yulius. 2015. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Vol. 04, No. 3. November 2015.

#### **D. WEBSITE**

Bayu, Dimas Jarot. “*Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar*”. 19 Juni 2018. Katadata.co.id.

<https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/komisioner-ombudsman-kritik-pelantikan-iriawan-jadi-pj-gubernur-jabar>.

Candraditya, Vincentius Jyestha. “*Tidak Ada Alasan Kuat Tempatkan Anggota Kepolisian sebagai Pj Gubernur Jabar*”. Tribunnews.com. 19 Juni 2018. [www.tribunnews.com/nasional/2018/06/18/tidak-ada-alasan-kuat-tempatkan-anggota-kepolisian-sebagai-pj-gubernur-jabar](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/18/tidak-ada-alasan-kuat-tempatkan-anggota-kepolisian-sebagai-pj-gubernur-jabar).

Devianti, Ika. “*Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur*”. Liputan6.com. 25 Januari 2018.

<http://news.liputan6.com/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal-polisi-jadi-plt-gubernur>

Djamil, M. Nasir. “*Polri dan Godaan Kekuasaan Sipil*”. Serambinews.com. 12 Februari 2018. <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/12/polri-dan-godaan-kekuasaan-sipil>.

Lazuardi, Glery. “*Kemendagri Ungkap Alasan Penunjukan Komjen Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar*”. Tribunnews.com. 18 Juni 2018.

[www.tribunnews.com/regional/2018/06/18/kemendagri-ungkap-alasan-penunjukan-komjen-iriawan-sebagai-pj-gubernur-jabar](http://www.tribunnews.com/regional/2018/06/18/kemendagri-ungkap-alasan-penunjukan-komjen-iriawan-sebagai-pj-gubernur-jabar).

Nurjianto, “*Kemendagri: Iriawan tidak perlu Mengundurkan Diri dari Polri*”,  
Media Indonesia. 21 Juni 2018.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/167452-kemendagri-iriawan-tidak-perlu-mengundurkan-diri-dari-polri.html>

Nadlir, Moh. “*Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur*”. Kompas.com. 26 Januari 2018

<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/23505851/mendagri-sebut-presiden-jokowi-setuju-jenderal-polisi-jadi-penjabat-gubernur>.

Solehudin, Mochamad. “*Komjen Iriawan Pj Gubernur, Pengamat: Pemerintah Tidak Konsisten*”. detikNews. 19 Juni 2018.

[news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernur-pengamat-pemerintah-tidak-konsisten](https://news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernur-pengamat-pemerintah-tidak-konsisten).

---

“*Sempat Batal, Ini Alasan Iriawan Kini Dilantik Jadi Pj Gubernur*”. detikNews. 18 Juni 2018.

[news.detik.com/berita/4072392/sempat-batal-ini-alasan-iriawan-kini-dilantik-jadi-pj-gubernur](https://news.detik.com/berita/4072392/sempat-batal-ini-alasan-iriawan-kini-dilantik-jadi-pj-gubernur).

#### **E. Lain-Lain**

Redaksi Interaksara. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*. Tangerang: Redaksi Interaksara.

SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 Perihal: Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Perihal: Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian